

## NILAI AKSIOLOGIS KEBIJAKAN COVID-19

Zumrotin Firdaus<sup>1</sup>, Tri Susilowati<sup>2</sup>, Markhamah<sup>3</sup>  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
immawatimefirda@gmail.com<sup>1</sup>, trisusilowatiskanja@gmail.com<sup>2</sup>,  
mar274@ums.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian seputar pandemik Covid-19 dari dunia medis sedang terus berlangsung (L & Shindo, 2020). Penelitian tentang wabah ini juga dilakukan dari perspektif sosial secara lebih luas (Long, 2020). Ada beberapa kebijakan di berbagai sektor, antara lain kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan di bidang ekonomi, kebijakan di bidang kesehatan, dan kebijakan di bidang sosial sebagai bidang yang terdampak dari adanya Covid-19. Tujuan makalah ini adalah mengetahui nilai aksiologi kebijakan pencegahan covid-19. Nilai aksiologis pada sector pendidikan adalah Untuk UN yang ditiadakan memberikan manfaat bagi para siswa bahwa tidak hanya dengan patokan angka mereka bisa lulus dari sekolahnya. Nilai aksiologis pada sector ekonomi adalah Dengan adanya prioritas belanja pada APBN, pemerintah dapat menghemat banyak dana dari anggaran yang tidak begitu penting untuk dialokasikan langsung kepada rakyat yang membutuhkan. Nilai aksiologis dibidang kesehatan adalah mengimpor alat-alat kesehatan, memberikan insentif bagi tenaga kesehatan. Nilai aksiologis dibidang sosial adalah Toleransi dan kepekaan soaial yang semakin terasah.

**Katakunci:** virus covid-19, nilai aksiologis, kebijakan pemerintah.

### ABSTRACT

Research around the Covid-19 pandemic from the medical world is ongoing (L & Shindo, 2020). Research on this outbreak was also carried out from a broader social perspective (Long, 2020). There are a number of policies in various sectors, including policies in the field of education, policies in the field of economics, policies in the field of health, and policies in the social sector as a field affected by the existence of Covid-19. The purpose of this paper is to determine the axiological value of co-19 prevention policies. Axiological value in the education sector is for the National Examination which is negated to provide benefits for students that not only by benchmarking numbers they can graduate from their school. Axiological value in the economic sector is that by prioritizing spending on the APBN, the government can save a lot of funds from a budget that is not so important to be allocated directly to people in need. Axiological value in the health sector is importing medical devices, providing incentives for health workers. Axiological values in the social field are social tolerance and sensitivity which are increasingly honed.

**Keywords:** activities, learning outcomes. problem solving learning.

### PENDAHULUAN

Umat manusia dewasa ini sedang berada dalam kesedihan mendalam akibat mewabahnya Coronavirus Disease (Covid-19) yang melanda hampir di seluruh belahan dunia (Mahase, 2020). Covid-19 bermula timbul di Wuhan, Cina (Shi, et al., 2020) dan telah diumumkan

sebagai *pandemic* oleh organisasi kesehatan dunia (Sohrabi, et al., 2020). Berbagai negara telah menerapkan isolasi, yaitu pemisahan orang sakit dengan penyakit menular dari orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi (Smith & Freedman, 2020). Diterapkan pula karantina, yakni

pembatasan pergerakan orang yang diduga telah terkena penyakit menular tetapi tidak sakit, baik karena mereka tidak terinfeksi atau karena mereka masih dalam masa inkubasi (Smith & Freedman, 2020). Karantina medis dianggap sebagai salah satu cara paling penting dan efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular di zaman modern ini (Goje, 2017).

Penelitian seputar pandemik Covid-19 dari dunia medis sedang terus berlangsung (L & Shindo, 2020). Penelitian tentang wabah ini juga dilakukan dari perspektif sosial secara lebih luas (Long, 2020). Dijumpai pula penelitian yang dilakukan oleh Goje (2017) tentang pencegahan wabah menular perspektif hadis. Penelitian ini membahas isolasi dan karantina medis untuk pencegahan penyakit menular sebagai hal yang dijustifikasi menurut hadits riwayat Shahih Bukhari secara *mua'llaq* dari hadits Abu Hurairah dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda "*Hindarilah orang yang terkena lepra seperti halnya kalian menghindari seekor singa.*" (Goje, 2017). Secara spesifik, Darmalaksana (2020) membahas hadis tentang wabah penyakit berkenaan dengan penerapan *social distancing* (menjaga jarak sosial). Penelitian tersebut mengakui konsep *social distancing* sebagai original dari Nabi Saw. (Darmalaksana, 2020). Virus Covid-19 atau korona adalah sekumpulan virus dari subfamili

*Orthocoronavirinae* dalam keluarga *Coronaviridae* dan *ordo Nidovirales*. Kelompok virus ini yang dapat menyebabkan penyakit pada burung dan mamalia, termasuk manusia. Pada manusia, covid-19 menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya lebih mematikan. Dalam kondisi saat ini, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari gejalanya, orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Saat ini di tahun 2020, perkembangan penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Di hampir seluruh negara diterapkan isolasi, karantina, dan *social distancing* (menjaga jarak sosial). Isolasi adalah pemisahan orang sakit dengan penyakit menular dari orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi (Smith & Freedman, 2020). Karantina berarti pembatasan pergerakan orang yang diduga telah terkena penyakit menular tetapi tidak sakit, baik karena mereka tidak terinfeksi atau karena mereka masih dalam masa inkubasi (Smith & Freedman, 2020). Adapun *social distancing* dirancang untuk

mengurangi interaksi antara orang-orang dalam komunitas yang lebih luas, di mana individu mungkin tertular tetapi belum diidentifikasi sehingga belum terisolasi (Smith & Freedman, 2020). Ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak cukup isolasi, karantina, dan social distancing saja, tetapi perlu penerapan *social containment* (pengungkungan sosial) dalam perang lawan Covid-19 (Long, 2020). Pengungkungan sosial adalah intervensi pemerintah yang diterapkan ke seluruh komunitas, kota atau wilayah, yang dirancang untuk mengurangi interaksi pribadi, kecuali interaksi minimal untuk memastikan pasokan vital (Smith & Freedman, 2020). Daripada itu, pendapat senada menyatakan, bila kebijakan penahanan Covid-19 gagal dan langkah-langkah menjaga jarak sosial tidak dapat dipertahankan sampai vaksin tersedia, pendekatan terbaik berikutnya adalah menggunakan intervensi pemerintah yang mengurangi angka kematian dan mencegah infeksi berlebih (Handel, Miller, Ge, & Fung, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah: “*Apa nilai aksiologi dari kebijakan pencegahan covid-19*”. Tujuan pembahasan makalah ini adalah untuk mengetahui nilai aksiologi dari kebijakan pencegahan covid-19 terhadap masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan *literature review*. Dalam melakukan pengumpulan data, penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan taktik politik dan *public relations* melalui data-data pendukung yang bersumber dari jurnal penelitian baik nasional maupun internasional, buku-buku penunjang, surat kabar, dan majalah.

*Literature review* seperti yang dijelaskan Cooper dalam Creswell (2010), memiliki beberapa tujuan yaitu menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pemerintah Pusat**

Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi di Indonesia yang meliputi presiden dan jajaran kementerian. Ada beberapa kebijakan di berbagai sektor, antara lain kebijakan di bidang pendidikan, kebijakan di bidang ekonomi, kebijakan di bidang kesehatan, dan kebijakan di bidang sosial

## **a. Kebijakan di bidang Pendidikan**

### **1) Pembelajaran Daring Untuk Anak Sekolah**

Penyebaran virus Corona yang meningkat, membuat pemerintah provinsi cepat ambil tindakan, salah satunya menutup sekolah awalnya selama dua pekan. Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020, pada poin ketiga adalah menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau menggantinya dengan *video conference* atau komunikasi daring lainnya, maka kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).

Sejumlah pemerintah daerah pun sudah meliburkan sekolah untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Sebagai solusinya, pembelajaran di sekolah diganti dengan pembelajaran dalam jaringan (daring), atau akrab disebut online. Bahkan kabarnya, beberapa daerah sudah memperpanjang masa belajar daring ini hingga dua bulan kemudian. Kebijakan ini diambil untuk menekan angka penularan wabah COVID-19. Kebijakan itu berlaku untuk seluruh siswa tingkat TK, SD, SMP dan sederajat di wilayah tersebut.

### **2) Kuliah Daring**

Sebagian besar universitas di Indonesia telah menerapkan kelas jarak jauh atau kelas daring, sebagai tindakan atas penyebaran COVID-19. Selain belajar dan mengajar, sejumlah kampus di tanah air sudah mengambil kebijakan hingga akhir semester genap ini agar semua kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring, termasuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, praktikum, dan bimbingan tugas akhir, tesis, serta disertasi.

Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan kondisi penyebaran virus Corona saat ini di tingkat nasional yang semakin parah. Selama pembelajaran daring, mahasiswa dan dosen diminta untuk melakukan kegiatan belajar mengajar menggunakan aplikasi daring seperti aplikasi *video conference*, e-mail, dan media sosial daring.

### **3) Ujian Nasional 2020 Ditiadakan**

Presiden dalam Rapat Terbatas yang diselenggarakan pada Selasa (24/3) bersama menteri terkait, sudah ketok palu. Hasilnya, pemerintah mengumumkan Ujian Nasional (UN) di tahun ini resmi ditiadakan. Mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Langkah tersebut diambil sebagai bagian dari sistem respons pandemi

COVID-19, yakni dalam rangka memprioritaskan keselamatan dan kesehatan rakyat. Kebijakan pemerintah meniadakan UN. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menggandeng Komisi X DPR RI untuk membahas pengganti UN. Opsinya ada dua, melakukan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) secara online atau menerapkan metode kelulusan dengan menimbang nilai kumulatif siswa selama belajar di sekolah.

Opsi meniadakan UN untuk sekolah menengah, dasar dan madrasah ini pun hanya akan diambil jika pihak sekolah menjamin mampu menyelenggarakan USBN secara daring. Ini berarti sekitar 1 juta siswa SMA, SMK, SMP, dan Madrasah akan menyelesaikan soal UN di rumah masing-masing. Kabarnya, total peserta UN di Indonesia mencapai 7.072.442 peserta dari total 85.959 unit sekolah penyelenggara di 531 kabupaten kota di 34 provinsi. Namun, jika pihak sekolah tidak dapat menggelar pelaksanaan USBN secara daring ini maka USBN pun akan dibatalkan. Alasannya cukup jelas, unit komputer soal UN dan server penyimpan dan pengelola jawaban soal UN berada di 99.048 Server Sekolah (Utama). Karena belum final, Kemdikbud masih akan terus berkoordinasi dengan Presiden

Presiden untuk mengeluarkan kebijakan terkait penggantian UN. Menurut jadwal, UN SMA seharusnya dilaksanakan pekan depan. Begitu pula dengan UN SD serta SMP yang semula dijadwalkan paling lambat akhir April.

#### **4) UTBK SBMPTN 2020 Diundur**

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mengeluarkan kebijakan menunda pendaftaran dan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 2020. Hal ini dilalukan akibat pandemi global COVID-19 yang sudah masuk Indonesia. Tidak hanya pendaftaran dan pelaksanaan UTBK tahap pertama saja yang ditunda, pendaftaran tahap kedua UTBK 2020 juga ditunda. Untuk info terbaru seputar pelaksanaan UTBK SBMPTN 2020 ini akan diberikan lebih lanjut nantinya ketika situasi sudah beranjak pulih.

#### **5) Pelaksanaan SNMPTN Masih Dalam Pengkajian**

Tak hanya pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 saja yang dinyatakan mundur jadwalnya, pengumuman kelulusan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2020 juga demikian. Peserta SNMPTN 2020 pun harus kembali bersabar karena pengumuman kelulusan SNMPTN diundur dari semula 4 April menjadi 8 April 2020.

Kebijakan baru itu disampaikan Ketua Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPPT) Mohammad Nasih (21/3). Beliau menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan sehingga pengumuman kelulusan diundur. Di antaranya, masih berlangsungnya masa pengisian data nomor pendaftaran kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah yang dilaksanakan pada 2 hingga 31 Maret.

#### **b. Kebijakan di Bidang Ekonomi**

Presiden meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

Selanjutnya, Presiden meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. "Bantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya terjaga," ujar Presiden. Presiden meminta program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan

harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Presiden secara khusus menyoroti program Padat Karya Tunai di beberapa kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan perikanan.

Selain itu, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan di industri pengolahan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun. Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

#### **c. Kebijakan di Bidang Kesehatan**

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 2019 *Corona Virus Disease* dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Keterbatasan alat kesehatan menjadi salah satu alasan bagi pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan. Beberapa kebijakan dalam bidang kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah di antaranya adalah:

1) Mengimpor alat kesehatan dari Tiongkok, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), masker bedah dan masker N95, alat rapid test serta ventilator; 2) Merubah fungsi Wisma Atlet menjadi RS Darurat Corona yang dapat menampung tiga ribu pasien bergejala ringan; 3) Menyiapkan fasilitas isolasi pasien di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu dan Pulau Galang, Batam; 4) Meningkatkan kualitas 132 rumah sakit (RS) rujukan bagi penanganan pasien Covid-19; dan 5) Memberikan insentif kepada tenaga kesehatan di wilayah darurat Corona termasuk memberikan santunan kematian kepada tenaga kesehatan (Lidwina, 2020; Lidyana 2020).

#### **d. Kebijakan di Bidang sosial**

Pembatasan di bidang sosial meliputi diliburkannya sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Pembatasan ini semakin jelas dengan adanya Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 yang membahas pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri. Permenhub tersebut juga memberlakukan larangan mudik dengan tujuan keluar atau masuk wilayah yang sudah menerapkan PSBB, zona merah penyebaran Covid-19 dan aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah PSBB (Permana, 2020).

Terkait kebijakan *lockdown* dan PSBB, sebenarnya juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Karantina adalah pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, atau pemisahan peti kemas, alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang atau Barang di sekitarnya.

#### **2. Kebijakan Pemerintah Daerah**

Berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan pencegahan corona virus disease (Covid-19), kebijakan ini akan terus dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi dan situasi serta kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah ditingkat yang lebih tinggi. Diantaranya adalah:

##### **a. Langkah Taktis Gubernur Jawa Barat**

Pada awal Februari Ridwan Kamil menetapkan Jawa Barat berstatus siaga satu, kemudian membangun pusat Informasi dan koordinasi Covid-19 Jawa barat yang bisa diakses oleh warga. Jawa Barat berinisiatif melakukan tes proaktif atau pemeriksaan sample akan diperiksa di laboratorium kesehatan

Jawa-Barat, bekerja sama laboratorium mikrobiologi dan parasitologi Fakultas Kedokteran UNPAD dan Pusat penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB dengan standar WHO *Biosafety Level 2*. Pemberlakuan PSBB juga diambil Gubernur sebagai langkah untuk penekanan angka positif corona.

#### **b. Langkah Taktis Gubernur DKI Jakarta**

Di tengah merebaknya virus Corona di Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020, Gubernur Anis Baswedan memutuskan untuk meniadakan hari bebas kendaraan (*Car free day*) yang biasa dilakukan pada setiap hari minggu di beberapa jalanan protokol di Jakarta. Peniadaan ini akan berlangsung dalam dua minggu dan akan dievaluasi lagi hingga beberapa saat ke depan. Beliau juga menghimbau bagi jajaran Pemprov yang memiliki gejala virus corona untuk segera melaporkan diri. Pemprov DKI juga menunda penyelenggaraan Formula E yang akan diselenggarakan di Monas pada bulan Juni 2020. Ia juga mengingatkan untuk mengurangi kontak fisik antar manusia atau *social distancing*.

Secara spesifik Gubernur Jakarta, Anies Baswedan memerintahkan langsung kepada para wali kota, Camat, dan lurah untuk menyampaikan larangan tersebut kepada warga di wilayahnya masing-masing dalam rapat internal Pemprov DKI di Gedung Dinas

Pendidikan DKI Jakarta pada tanggal 19 Maret 2020.

#### **c. Langkah Taktis Gubernur Jawa Timur**

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menekankan agar meningkatkan kewaspadaan mencegah pandemi corona. Di antaranya bidang perhubungan yang diminta menyediakan fasilitas hand sanitizer dan sabun di setiap fasilitas publik seperti terminal, bandara, stasiun, dan pelabuhan, menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi thermal gun dan masker. Sedangkan di bidang Informasi dan Komunikasi, Khofifah meminta pihak terkait menyediakan Call Center, yang terintegrasi dengan nomor 1500117, 081334367800 (Dinas Kesehatan Pemprov Jatim), dan 08124922279 (RSUD dr. Soetomo Surabaya).

#### **d. Langkah Taktis Bupati Tapanuli Utara**

Langkah taktis yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Utara adalah menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) daerah Silangkitang untuk membantu pemerintah dalam mengadakan wastafel buatan yang memanfaatkan drum untuk membuat sanitizer dan dibagikan ke beberapa titik penting dan pusat keramaian sebagai sarana warga cuci tangan untuk mencegah penularan Covid-19. Selain itu memerintahkan Tenaga BLK untuk membuat ramuan minuman kesehatan yang diracik dari Jahe. Ini adalah upaya yang dilakukan

untuk menambah stamina dan kesehatan warga.

Upaya-upaya dilakukan untuk memberikan contoh kepada warga dan menghimbau betapa edukasi yang disampaikan melalui BLK Silangkitang adalah agar masyarakat peduli untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam mencegah penularan Virus Corona Covid-19 di daerahnya. Selain itu juga memerintahkan untuk membuat masker yang dibantu oleh para tenaga BLK di daerahnya dan kemudian dibagikan kepada masyarakat Tapanuli Utara.

#### **e. Langkah Taktis Gubernur Jawa Tengah**

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerbitkan surat edaran terkait peningkatan kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi Covid-19 atau Virus Corona, pada Sabtu tanggal 14 Maret 2020. Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati atau wali kota, pimpinan perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal serta seluruh pimpinan BUMN Jawa Tengah.

Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan edukasi mengenai upaya pencegahan dan pengendalian kepada elemen masyarakat dan pelaku usaha sesuai kewenangannya. Menyampaikan agar seluruh instansi melakukan pencegahan sedini mungkin dengan menyediakan berbagai peralatan dan kebutuhan pengecek kondisi tubuh dengan menyediakan alat deteksi suhu

tubuh, hand sanitizer serta masker bagi yang sakit untuk mendukung upaya pencegahan dan pengendalian. Untuk informasi ini Pemprov Jawa Tengah membuka layanan pengaduan dan penanganan virus Corona di dinas kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui nomor telepon 024-3580713. Selain itu Pemprov Jateng sudah menyiapkan 13 RS Rujukan untuk kasus Corona per tanggal 14 Maret 2020.

### **3. Nilai Aksiologis**

Ada tiga pilar utama dalam filsafat ilmu yang selalu menjadipedomannya, yaitu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Suriasumantri, 1987). Secara etimologis, aksiologi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "*aksios*" yang berarti *nilai* dan kata "*logos*" berarti *teori*. Jadi, aksiologi, merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Suriasumantri (1990) mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang di peroleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia (1995) adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika. Menurut Wibisono seperti yang dikutip Surajiyo (2007), aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalan, serta

penerapan ilmu. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan *value and valuation*.

Nilai-nilai keluhuran hidup manusia dibahas oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai secara teoretis yang mendasar dan filsafati, yaitu membahas nilai sampai pada hakikatnya. Karena aksiologi membahas tentang nilai secara filsafati, maka juga disebut *philosophy of value* (filsafat nilai). Aksiologi adalah cabang Filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebenaran, keindahan, ke-baik, dan religious (Kattsoff, 1996:327).

Nilai aksiologis di masa pandemi Covid-19 bukan hanya menjadi persoalan medis dan ekonomis, tapi juga menyangkut persoalan etis dan sosial. Etika atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang mengulas baik buruknya sikap dan tindakan manusia. Berbagai persoalan etis muncul ke permukaan, dengan yang paling menonjol ialah persoalan di bidang etika medis, karena para dokter dan para perawat harus segera mengambil keputusan ketika berhadapan dengan pasien Covid-19.

#### **4. Nilai Aksiologis Kebijakan Pencegahan Covid -19**

##### **a. Nilai aksiologi kebijakan di bidang pendidikan**

Dengan adanya pembelajaran Daring untuk anak sekolah memberikan manfaat positif bagi siswa dan bagi guru. Manfaat untuk siswa diantaranya memaksimalkan ketrampilan dan pengetahuan IT siswa sehingga membuat siswa mengerahkan segala kemampuannya untuk bisa meng upgrade IT nya agar bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Mereka dipaksa untuk meleak teknologi dengan berbagai macam media pembelajaran, semisal *Google meet, zoom, google classroom, edmodo* ,dan lain sebagainya, yang mana untuk keseharian normal mereka amat sangat jarang menggunakan.

Untuk UN yang ditiadakan memberikan manfaat bagi para siswa bahwa tidak hanya dengan patokan angka mereka bisa lulus dari sekolahnya. Karena nilai kelulusan ditentukan dari nilai rata-rata raport selama lima semester hal ini menguntungkan karena nilai banyak ditentukan dari nilai harian mereka selama disekolah dan dengan tidak adanya UN mereka tidak harus wayangan atau istilahnya belajar semalaman untuk menghadapi UN. Untuk UTBK dan SNMPTN yang diundur memberikan manfaat bagi calon mahasiswa untuk mempersiapkan dirinya lebih matang lagi karena waktunya lebih panjang.

Sehingga nantinya yang lolos seleksi adalah mereka yang benar-benar siap dan mempersiapkan diri dengan baik.

#### **b. Nilai Aksiologis Kebijakan di Bidang Ekonomi**

Dengan Sembilan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid -19 memberikan manfaat yang sangat luar biasa diantaranya:

- 1) Dengan adanya prioritas belanja pada APBN, pemerintah dapat menghemat banyak dana dari anggaran yang tidak begitu penting untuk dialokasikan langsung kepada rakyat yang membutuhkan sehingga rakyat bisa terhindar dari masalah ekonomi selama pandemi serta bantuan tunai tanpa syarat menciptakan mekanisme distribusi sumber daya ekonomi secara lebih adil dan merata dengan cara-cara yang bermartabat.
- 2) Adanya *Refocusing* anggaran pemerintah biasa membantu rakyat dengan dana yang ada lewat jaring pengaman sosial. Pemerintah bisa memberikan bantuan bagi keluarga yang terdampak langsung Corona dengan menjamin kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Bantuan tunai tanpa syarat akan menjadi salah satu sumber pendapatan dasar yang dapat digunakan untuk kegiatan

konsumtif dan produktif secara bersamaan.

- 3) Program padat karya tunai memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkena PHK bisa untuk mendapatkan pekerjaan kembali sehingga kelangsungan hidupnya bisa terjamin serta mengasah kemandirian mereka dalam menghadapi hidup.

#### **c. Nilai Aksiologi di Bidang kesehatan**

Hak kesehatan pekerja merupakan salah satu jenis dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dipenuhi, dihormati dan dijamin oleh negara tanpa diminta sekalipun (Perwira, 2014). Dengan adanya kebijakan pemerintah dibidang kesehatan diantaranya mengimpor alat-alat kesehatan, memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan memberikan prioritas anak nakes untuk sekolah di sekolah negeri memberikan manfaat yang sangat luarbiasa.

Nilai yang terkandung dalam kebijakan tersebut diantaranya timbulnya rasa empati terhadap kinerja tenaga medis yang merupakan garda terdepan dalam memerangi pandemi. Timbulnya rasa kegotong-royongan di masyarakat untuk saling memperhatikan kesehatan di lingkungannya. Timbulnya rasa peduli terhadap kesehatan dan keamanan tetangganya. Selain itu masyarakat menjadi terbiasa menerapkan hidup

sehat dengan sering cuci tangan, membersihkan rumah dan lingkungannya.

#### **d. Nilai Aksiologi Kebijakan di Bidang Sosial**

Manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya PSBB adalah kemacetan jalan yang berkurang drastis karena kendaraan yang berada di jalan berkurang secara signifikan. Polusi udara dan suara bising yang berkurang banyak. Manfaat terbesar yang sangat dirasakan adalah hubungan antar anggota keluarga yang semakin akrab, dengan tetangga semakin akrab dan kerukunan dengan lingkungan yang semakin meningkat. Toleransi dan kepekaan sosial yang semakin terasah serta rasa individualisme yang semakin terkikis. Jurang antara sikaya dan miskin semakin pendek serta terciptanya kerja sama yang baik antar anggota masyarakat

#### **5. Dampak Positif dan Negatif Dari Kebijakan Covid-19**

Dampak positif dan negatif ini tentu saja tidak akan lepas dari aspek sosial dan ekonomi. Berbicara mengenai kebijakan, tentu saja akan ada dampak positif dan negative yang muncul disebabkan oleh wabah virus corona ini. Dampak positif dari adanya COVID-19 ini adalah semakin banyaknya waktu untuk beribadah dan berkumpul bersama keluarga, terhadap lingkungan juga terasa semakin bersih dan sejuk karena

tidak ada polusi. Dampak negative yang pertama bisa langsung dirasakan akibat wabah virus corona ini adalah merosotnya pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tidak segera diberlakukan *lockdown* dengan segera, maka virus akan terus masuk ke wilayah yang tadinya belum terjangkau dan semakin memperburuk suatu wilayah yang sudah terjangkau.

Dampak Negatif yang kedua adalah timbulnya peningkatan jumlah pengangguran akibat PHK atau pengurangan pekerja pada industri-industri. Mereka juga beralasan bahwa kondisi *force majeure* sehingga mereka harus mengurangi karyawan atau pekerjanya. Ketiga adalah terjadinya *panic buying* dimana masyarakat berbondong-bondong membeli bahan kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang banyak sebagai langkah persiapan *lockdown*.

#### **SIMPULAN**

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu kebijakan pasti mengandung nilai aksiologi dimana nilai aksiologi tersebut bisa berupa manfaat bagi masyarakat. Nilai aksiologi dari kebijakan pemerintah banyak yang membuat masyarakat merasa terlindungi, terayomi dan merasa diperhatikan tetapi ada juga yang merasa terabaikan dan terlantar. Hal tersebut dikarenakan penyaluran atau pemerataan manfaat dari kebijakn tersebut belum adil dan merata ke seluruh lapisan

masyarakat. Maka perlu dipikirkan kebijakan yang bisa diimplementasikan ke seluruh elemen masyarakat dan penyampaiannya tepat sasaran. Virus *corona* telah memperlihatkan arti *power* yang sesungguhnya. Ia menguliti lapisan di bawahnya menjadi sesuatu yang terlihat publik, menantang kekuasaan dan penguasa untuk berani berpihak pada kesejahteraan banyak orang, dengan segala konsekuensinya. Pandemi ini adalah ujian terberat untuk semua pemimpin di dunia karena langkah dan kebijakan yang diambil menunjukkan kecakapannya sebagai seorang pemimpin perang, negarawan, komunikator, serta ahli strategi terunggul di mata dunia dan warga yang telah memberikan kekuasaan ke tangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara. (2015). Sahya. *Metode Penelitian Administrasi*.
- Bergström, A., & Belfrage, M. J. (2018). News in Social Media: Incidental consumption and the role of opinion leaders . *Journal Digital Journalism*.
- Covey, S.R. (2005). *The 8<sup>th</sup> Habit : From Effectiveness to Greatness*. New York : Free Press.
- Creswell, J, W. (2010). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 3<sup>th</sup>*, Terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Darmalaksana, W. (2020). *Buku Hasil Kuliah Online Metode Penelitian Hadis Masa Work From Home Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). Corona Hadis. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W., Hambali, R. Y., Masrur, A., & Muhlas. (2020). Analisis Pembelajaran Online Masa WFH Pandemic Covid-19 sebagai Tantangan Pemimpin Digital Abad 21. *Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Farahnak, L. R., Ehrhart, M. G., Torres, E. M., & Aarons, G. A. (2019). The Influence of Transformational Leadership and Leader Attitudes on Subordinate Attitudes and Implementation Success . *Journal of Leadership & Organizational Studies*.
- Goje, K. (2017). Preventative Prophetic Guidance in Infection and Quarantine . *Journal of Ushuluddin*.
- Handel, A., Miller, J., Ge, Y., & Fung, I. C.-H. (2020). *If containment is not possible, how do we minimize mortality for COVID-19 and other emerging infectious disease outbreaks?* . Medrxiv: The preprint Server for Health Sciences.

<https://palu.tribunnews.com/2020/03/18/10-cara-pencegahan-virus-corona-covid-19-dari->

- [kementerian-kesehatan-hindari-area-segitiga-wajah?page=2](#). Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Covid-19 di Indonesia
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). *Theories of the Policy Cycle*. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods*(pp. 43-62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Jedaman, P., Buaraphan, K., Pimvichai, J., Yuenyong, C., & Jeerasombat, S. (2019). *Educational management in transition of science: Policies and strategic leaders for sustainable education 4.0 in the 21st century science classroom Maret 2019. AIP Conference Proceedings*. United States: AIP Publishing.
- Kekarantinaan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kesehatan
- Lidwina,A.(2020). *Ragam Langkah Presiden Meredam COVID19*. Diakses dari <https://katadata.co.id/infografi/k/2020/03/25/ragam-langkah-Presiden-meredam-covid19>
- Lidyana,V.(2020). *Presiden Guyur Rp75T Dana Kesehatan Hadapi Corona, Ini Daftarnya*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4960936/Presiden-guyur-rp-75-t-dana-kesehatan-hadapi-corona-ini-daftarnya>
- Long, N. J. (2020). *From social distancing to social containment: reimagining sociality for the coronavirus pandemic* . *Medicine Anthropology Theory*.
- Mahase, E. (2020). *Coronavirus: covid-19 has killed more people than SARS and MERS combined, despite lower case fatality rate* . *The BMJ*.
- Mardiana dan Darmalaksana,Jurnal Perspektif Vol. 4 No. 1 Mei 2020 Page 12-19 <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/26/07412441/9-kebijakan-ekonomi-Presiden-di-tengah-pandemi-covid-19-penanggulangan-cicilan>
- Mihardjo, L. W., & Rukman, R. A. (2018). *Does Digital Leadership Impact Directly or Indirectly on Dynamic Capability: Case on Indonesia Telecommunication Industry in Digital Transformation?* . *The Journal of Social Sciences Research*.
- Muslim, J. (2016). *Indeks Kepuasan Masyarakat (Ikm) Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Bandung Tahun 2015*. *Jispo*, 6(1), Retrieved from <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/1753>
- Ohain, B. P. (2019). *Leader Attributes for Successful Digital Transformation* . *ICIS Conference Proceedings*. AIS eLibrary.
- Permana,R.H.(2020).*Larangan Mudik 2020 Berlaku untuk Daerah PSBB ,Ini Daftarnya*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/>

- d-4989468/larangan-mudik-2020-berlaku-untuk-daerah-psbb-ini-daftarnya.
- Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 7 Nomor 3 (2020). ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050 - 255
- SE Mendikbud.(2020). *SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020*. Diakses dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/se-mendikbud-pelaksanaankebijakan-pendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-covid19>
- Shi, H. H., Jiang, N., Cao, Y., Alwalid, O., Gu, J., Fan, Y., & Zheng, C. (2020). *Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study* . *The Lancet Infectious Diseases*
- Shintya, G.A.(2020). *Pendidikan Era Revolusi Industri 4.0 di Tengah Covid-19*. Di akses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pendidikan-era-revolusi-industri-40-di-tengah-covid-19>.
- Smith, A. W., & Freedman, D. O. (2020). *Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak* . *Journal of Travel Medicine*.
- Sofuroh, F.U. (2020). *Publik Nilai Jateng Paling Responsif Tangani Covid-19*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4981993/publik-nilai-jateng-paling-responsif-tangani-covid-19>
- Sohrabi, C., Alsafi, Z., O'Neil, N., Khan, M., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Aghad, R. (2020). *World Health Organization declares global emergency: A review of the 2019 novel coronavirus (COVID-19)* . *International Journal of Surgery*.
- Sugiono. (2014). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf*. In *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Suriasumantri, J. S. (1987). *Ilmu dalam perspektif*. Jakarta: Gramedia.
- Toha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.